

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS

Oleh

Sunyoto dan E. Widayati

(Dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta)

ABSTRACT

Poverty is an urgent problem of the Indonesian people requires treatment measures and approaches that are systematic, integrated and comprehensive. The role of the tourism sector in improving the economy is relatively large. The purpose of this paper is to discuss on poverty and an effort to alleviate through the development of community-based tourism. Poverty is multidimensional, and involves some complex aspects. Therefore, the alleviation needs synergy and the concern of actors/stakeholders. There are three considered components are needed to formulate strategies of poverty reduction through community-based tourism sector are the actors/stakeholders, institutional and pro poor policy, integrated and sustainable.

Keywords: *poverty alleviation, development of tourism sector, community empowerment (development)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa Indonesia yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Meskipun program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya, akan tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini pada umumnya hanya terbatas pada gejalanya saja tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Pariwisata menjadi salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian, karena menyediakan kesempatan kerja

dan peluang berusaha. Beberapa ahli berpendapat bahwa pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dapat membuka jalan lebih lebar bagi masyarakat miskin untuk menangkap peluang dan hasil pengembangan pariwisata. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan pariwisata, yakni pengurangan kemiskinan. Damanik (2005) menyatakan pemerintah di negara berkembang sangat yakin bahwa program-program pengembangan kepariwisataan mempunyai potensi besar untuk mengentaskan masyarakat dari kepungan kemiskinan apabila didesain berdasarkan realitas obyektif kehidupan masyarakat miskin dan implementasinya sinergis

dengan kondisi perkembangan industri itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan menggambarkan adanya ketimpangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, lingkungan maupun sosial. Ketimpangan tersebut terjadi karena ada kelompok yang diuntungkan oleh kondisi atau keputusan-keputusan publik dan ada kelompok yang dirugikan sehingga mereka menjadi terpinggirkan. Kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Sedangkan kemiskinan relatif mengukur pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan (Kuncoro, 1997 dalam Wuri 2006).

Dengan kata lain kemiskinan absolut penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut, sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam masyarakat. Menurut Sayogyo (1982) kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras

dan kebutuhan gizi. Seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memperoleh penghasilan perkapita setara 320 kg beras untuk daerah perdesaan, atau 480 kg beras untuk penduduk di perkotaan.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tjokrowinoto (2005) memberi gambaran sektor pariwisata mempunyai potensi yang amat besar untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi disisi lain sektor pariwisata juga mempunyai potensi untuk menimbulkan 'pemiskinan' (*impoverishment*) maupun memperbesar kesenjangan sosial. Kebijakan publik di dalam bidang pariwisata haruslah memperhatikan potensi pariwisata untuk menanggulangi kemiskinan, akan tetapi juga mewaspadaai potensi pariwisata untuk melakukan pemiskinan dan menciptakan kesenjangan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan bersifat multidimensi, dan menyangkut beberapa aspek yang kompleks, oleh karenanya dalam

penanggulangannya memerlukan sinergitas dan kepedulian dari semua pihak. Tidak saja dari masyarakat miskin itu sendiri tetapi juga para pengambil kebijakan baik pemerintah maupun non pemerintah, swasta serta lingkungan yang mendukung penanggulangan kemiskinan.

Narayan (2000) berpendapat bahwa yang membuat kemiskinan sulit ditangani adalah karena sifatnya yang tidak saja multidimensional tetapi juga saling mengunci; dinamik, kompleks, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan peristiwa yang khas per lokasi.

Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan data dari SUSENAS, jumlah dan persentase penduduk miskin

di Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi, meskipun terjadi kecenderungan penurunan, namun pada tahun 1998 dan 1999 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Tabel: 1

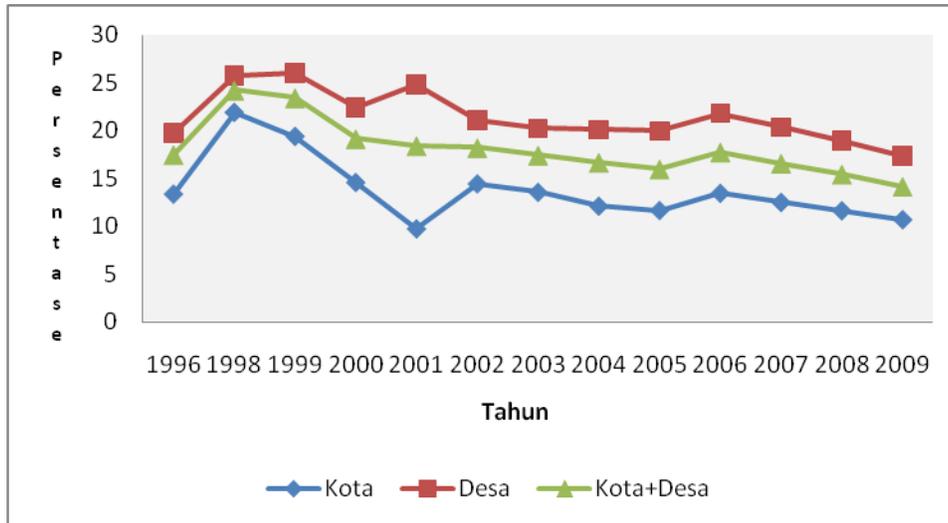
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah Tahun 1996 – 2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009*)	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

*) Maret 2009

Gambar:1
Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Tahun



Sumber: Susenas

Peran Pariwisata dalam Perekonomian Indonesia

Jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata ditentukan oleh jumlah kunjungan, pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurut data BPS, tahun 2004 sektor pariwisata menduduki rangking ke dua dalam mencetak devisa negara setelah minyak dan gas bumi dengan nilai sebesar US\$ 4.798 juta. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan karena tergeser oleh komoditi pakaian jadi, karet olahan dan kelapa sawit, namun pada tahun 2007 mengalami kenaikan rangking walaupun masih dalam posisi ke lima. Kenaikan posisi terus terjadi hingga tahun 2009 mencapai peringkat ketiga penyumbang devisa negara dengan nilai sebesar US\$ 6.298 juta. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata mempunyai peran yang cukup strategis dalam pengembangan perekonomian, khususnya penyumbang devisa negara.

Dari analisis beberapa ahli (de Kadt, Mathieson dan Wall; Luebben; Max dalam Damanik J, 2005) juga menyimpulkan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam tiga bentuk, yakni: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan antar-wilayah. Dalam Renstra Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005 – 2009, menunjukkan tren pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang, di antaranya 438 juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifik dan 100 juta orang ke Cina. Melihat jumlah yang demikian besar wisatawan, maka Indonesia yang dapat menawarkan segala daya tariknya untuk mendatangkan wisatawan, perlu merebut pangsa pasar wisata tersebut. Kondisi ini merupakan peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan pariwisata dalam

rangka menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan sehingga akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Potensi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan kajian secara ekonomis dengan mempertimbangkan bahwa sektor pariwisata cukup besar andilnya dalam menyumbang devisa negara, maka sektor pariwisata memiliki potensi yang cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan melalui program-program pengembangan kepariwisataan. Hal ini mendukung tujuan kepariwisataan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009, yakni:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. menghapus kemiskinan,
- d. mengatasi pengangguran,
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya,
- f. memajukan kebudayaan,
- g. mengangkat citra bangsa,
- h. memupuk rasa cinta tanah air,
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa,
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas.

Mengingat kemiskinan di Indonesia sebagian besar di wilayah pedesaan (periksa tabel 1), maka pengelolaan sumberdaya pedesaan merupakan hal yang perlu dilakukan melalui sektor pariwisata sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memupuk dan memanfaatkan modal sosial yang dipadukan dengan kearifan lokal akan meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan pariwisata di wilayahnya. Masyarakat pedesaan

didorong untuk bekerjasama guna mencapai tujuan bersama. Adanya rasa solidaritas, saling asah asih dan asuh, akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama demi untuk kepentingan bersama. Kerjasama yang dilandasi kepercayaan akan terjadi apabila terdapat kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, saling menolong di antara warga masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk dapat memulihkan atau meningkatkan kapasitas (keberdayaan) suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang merdeka, yang bertindak berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Dengan terciptanya masyarakat yang berdaya sebagai pelaku pembangunan diharapkan dapat (mampu) mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai obyek pembangunan tetapi terlibat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan di wilayahnya.

Memadukan pengembangan pariwisata sekaligus pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan wisata bukan suatu kemustahilan (DFID, 1999 dalam I Ketut Surya Diarta, 2009) paling tidak ada empat alasan pokok yang menjustifikasi hal ini, yaitu (1) pariwisata mempunyai potensi besar dalam keterkaitannya dengan jenis usaha lain berbasis lokal (di daerah tujuan wisata) karena wisatawan langsung datang ke kawasan wisata dimaksud; (2) pariwisata merupakan industri dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dan proporsi tenaga kerja perempuan juga sangat besar; (3) pariwisata mempunyai potensi sebagai 'penyelamat' bagi suatu daerah bahkan suatu negara di saat tidak adanya potensi ekspor lain yang dapat diandalkan

karena sifat produk pariwisata yang unik dan 'export going no where', dan; (4) pariwisata dapat dibangun atas sumber daya alam atau sumber daya budaya yang terkadang hanya aset tersebutlah yang dimiliki oleh penduduk miskin.

Yoeti ((2000) menyatakan dalam rangka membangun ekonomi desa

berdasarkan kerakyatan, membangun desa wisata sangat relevan. Dengan dibangunnya desa-desa wisata di semua DTW seluruh Indonesia diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Gambar 2: Lingkaran Berwisata



Sumber: Ardika, I.G

Seperti yang tersaji dalam gambar lingkaran berwisata diatas, nampak adanya beberapa hal yang akan terpengaruh dengan adanya kegiatan pariwisata diantaranya: *home stay* atau pondok wisata; restoran, rumah makan, warung makan; biro perjalanan wisata; atraksi sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat; hiburan; cendera mata; dan pemandu wisata. Semuanya dapat membuka peluang usaha dan pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan dan keberdayaan warga miskin. Yang diperlukan adalah bagaimana agar peluang-peluang ini dapat ditangkap oleh warga miskin. Oleh karenanya dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas melalui sektor pariwisata, perlu memperhatikan

tiga hal sebagai berikut: (1) pelaku/*stake holders*, (2) kelembagaan, (3) kebijakan yang propoor, terintegrasi dan berkesinambungan.

1. Pelaku/*stake holders*

Keterlibatan pelaku dalam pengembangan pariwisata meliputi masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok peduli. Masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam kegiatan kepariwisataan. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata di wilayahnya, sejak dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai pengelola pariwisata di wilayahnya, pemilik *guest house/home stay*, pemandu lokal, penyedia konsumsi, *supplier* oleh-oleh/souvenir,

dan pemain atraksi serta masih banyak lagi

2. Kelembagaan

Sebagai wadah berkumpulnya masyarakat untuk bermusyawarah dalam rangka mendiskusikan potensi sumberdaya yang dimiliki maupun permasalahan yang dihadapi, pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kemampuan bernegosiasi perlu dikembangkan adanya kelembagaan. Kelembagaan sebagai representasi dari masyarakat (miskin). Kelembagaan ini hendaknya merupakan sebuah kelembagaan yang transparan dan akuntabel, sehingga dipercaya oleh masyarakat maupun pihak lain untuk melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan pariwisata. Pengorganisasian masyarakat diperlukan guna menggali kesadaran masyarakat terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan menggalang potensi kepariwisataan agar lebih peka dan tanggap serta mampu menjawab perubahan yang terjadi.

3. Kebijakan yang pro-poor, terintegrasi dan berkesinambungan.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya kebijakan yang tidak memihak pada warga miskin, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang memihak warga miskin, sehingga dapat membuka kesempatan usaha, membuka akses ke sumberdaya dan informasi. Kebijakan yang sektoral dan tidak berkesinambungan menyebabkan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan

yang terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran birokrasi dan upaya *good governance* dengan menjalankan fungsi 4 tor (Fasilitator, Koordinator, Motivator, Inovator).

Penutup

Kemiskinan bersifat multidimensi, dan menyangkut beberapa aspek yang kompleks, oleh karenanya dalam penanggulangannya memerlukan sinergitas dan kepedulian dari semua pihak. Tidak saja dari masyarakat miskin (internal) itu sendiri tetapi juga para pengambil kebijakan baik pemerintah maupun non pemerintah dan lingkungan (eksternal) yang mendukung penanggulangan kemiskinan.

Peran sektor pariwisata dalam menunjang perekonomian dalam tiga bentuk, yakni: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan antar-wilayah. Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sektor pariwisata dengan konsep pemberdayaan masyarakat dengan menggali dan memunculkan kesadaran kritis masyarakat (miskin) serta mendorong partisipasi mereka dalam mengelola kegiatan kepariwisataan. Masyarakat miskin tidak lagi menjadi obyek tetapi sebagai subyek pembangunan pariwisata. Untuk itu dibutuhkan adanya kelembagaan yang representatif dan dapat dipercaya sebagai wadahnya serta adanya kebijakan dari pemerintah yang pro-poor, terintegrasi dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Ardika, I.G. 2009. *Wisata Desa (Konsep dan Pengembangan)*, makalah disampaikan pada lokakarya Wisata Desa, Yogyakarta

Badan Pusat Statistik

Damanik, J. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Dari Konsep Menuju Implementasi. Katalog Dalam Terbitan: Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata, Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*. Kepel Press: Yogyakarta

Diarta, I. K. S. 2009. *Pro-poor Tourism Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Tinjauan Teoritis Pendekatan Metode Asset Based and Community-Driven Development*. Jurnal Kepariwisata Indonesia, (IV,1), hal 13 – 33

Narayan, D. 2000. *Voices of the Poor, World Bank Publications*

Renstra Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005 – 2009

Sayogyo, 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

SUSENAS, 2010.

Tjokrowinoto, M, 2005. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik. Katalog Dalam Terbitan: Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata, Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*. Kepel Press: Yogyakarta

Undang-Undang Kepariwisata NO. 10 tahun 2009

Wuri, J, 2006. *Kebijakan Pengurangan Kemiskinan: Simulasi Model KUT Indorani*. Jurnal Studi Ekonomi (JSE) (I,1), Juni 2006, hal 51-63.

Yoeti, OA, 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. p.t. pertja: Jakarta

